



## Pendataan KMS Harus Cermat-Obyektif

**JOGJA --** Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Jogja Agus Prasetyo ST minta kepada Dinas Sosial agar lebih cermat dalam mendata warga yang berhak menerima Kartu Menuju Sehat (KMS) dan program ditingisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan kedua program itu bisa tepat sasaran.

Ketika ditemui *Bernas Jogja*, Senin (3/11) kemarin Agus Prasetyo mengungkapkan pendataan calon penerima program KMS dan ditingisasi merupakan tugas Dinas Sosial. Namun karena keterbatasan personil maupun waktu, pendataan akhirnya melibatkan LPMK, RT dan RW.

"Saya bisa memahami. Ini dilakukan karena LPMK, RW dan RT tahu persis tentang kondisi wilayahnya. Sehingga data-data yang disampaikan bisa sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Namun realitanya di beberapa wilayah masih saja muncul permasalahan klamengungkapkan pendataan like and dislike serta ada pula yang mengaitkan dengan

>> KE HAL 7



**Agus Prasetyo** DOK

*Sambungan dari halaman 1*  
 bendera parpol.  
 "Artinya, meskipun ada warga yang sebenarnya sangat membutuhkan KMS dan ditingisasi, tapi karena bukan dari parpol yang sama akhirnya tidak didata. Bahkan ada pula yang karena unsur perselisihan pribadi, warga yang benar-benar membutuhkan tidak diusulkan sebagai penerima KMS dan ditingisasi. Terus terang, Fraksi Demokrat telah menerima banyak pengaduan dari warga yang khususnya menyangkut permasalahan ini," jelas Agus.

Kondisi ini memang sangat ironis. Mengingat rata-rata kejadian ini menimpa masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan. Sehingga Agus Prasetyo minta kepada Dinas Sosial agar mengantisipasi kejadian tersebut. Diantaranya dengan menjaga obyektifitas dalam pendataan.

Dijelaskannya, Pemkot Jogja telah memiliki program berlian dalam mengentaskan masyarakat miskin, yaitu diantaranya melalui program KMS dan ditingisasi. Karena dinilai sangat bermanfaat, maka Pemkot pun akhirnya mengalokasikan dana sekitar Rp 70 Milyar.

Bagi warga program KMS dirasakan sangat membantu. Terlebih ketika mereka melakukan pemeriksaan kesehatan maupun untuk pendidikan. Sebab dengan KMS, tidak sedikit warga yang bisa berobat secara gratis. Bahkan mereka bisa menyekolahkan anaknya secara gratis.

Karena hal itu, maka tidak sedikit warga yang merasa kesulitan ketika KMS mereka dicabut secara sepihak. "Kalau memang pemegang KMS sudah mampu, silahkan KMS itu untuk ditarik. Tapi jangan asal main tarik. Klarifikasikan dulu secara langsung kepada pemegang KMS. Ini dengan harapan supaya obyektif dan tidak menyulitkan warga," tegasnya.

Meski keberadaan KMS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin, namun kenyataannya masih ada pihak yang memandang sebelah mata. Ironisnya, pihak yang memandang sebelah mata ini justru instansi yang seharusnya melayaninya. (skd)

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. Kelurahan Ngampilan			

Yogyakarta, 28 April 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005